

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 2001 otonomi daerah dan desentralisasi berjalan efektif. Hal ini menjadi awal pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah secara langsung dirasakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Tingginya asumsi masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi daerah menjadikan kinerja pemerintah menjadi salah satu perhatian masyarakat. Isu terkait kinerja pemerintah daerah selalu menjadi perhatian warga karena pemerintah belum menunjukkan hasil yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Masyarakat menuntut agar pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Kinerja pemerintah yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal dapat dikatakan baik. Pembangunan yang baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya merupakan nilai keberhasilan dari kinerja pemerintahan. Pembangunan tidak hanya berarti mengedepankan percepatan dan keberhasilan di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup penataan dan pembaharuan

semua sistem dan kegiatan ekonomi dan sosial untuk melindungi kehidupan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memperjelas pentingnya kinerja pemerintah daerah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Hal yang harus diperhatikan antara lain aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kinerja pemerintah daerah mencerminkan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan atau rencana yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dalam meningkatkan capaian kinerja secara nasional. Berdasarkan hasil IHPS II Tahun 2018 yang memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda terkait dengan 6 tema yaitu perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pembangunan kewilayahan, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah khususnya di Jawa Barat secara umum menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemda. Adapun permasalahan tersebut terkait ketidakstabilan makro ekonomi, pemerintah dan pengaturan kelembagaan, kondisi tenaga kerja

keuangan dan usaha, serta pengembangan infrastruktur dan kualitas hidup (PPID Provinsi Jawa Barat, 2019).



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 1.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2018

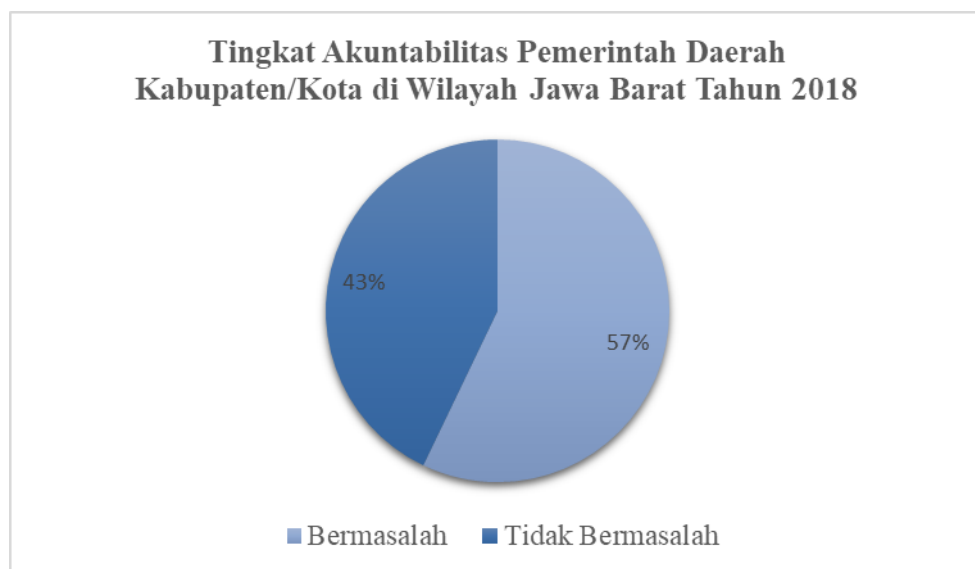
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat banyak yang mengalami masalah yakni sebesar 60%. Penyebab permasalahan tersebut yakni belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat layanan dasar maupun di tingkat layanan rujukan baik infrastruktur maupun tenaga kesehatan, sarana prasarana laboratorium pengujian pangan kurang memadai; serta daya saing kinerja antar provinsi yang lemah (PPID Provinsi Jawa Barat, 2019). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja tersebut berdampak terhadap penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu alat untuk mengukur penyelenggaraan pemerintah adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk yang menggunakan

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala untuk menjelaskan berhasil tidaknya misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam sektor publik menuntut pemerintah merespon masyarakat atas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya karena terdapat persepsi bahwa pemerintah tidak efisien dan memiliki kinerja yang buruk dalam memberikan pelayanan. Mappanyuki (2015) mengemukakan bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan anggaran diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dana masyarakat. Akuntabilitas merupakan asas tanggung jawab pemerintah daerah sejauh mana ia melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

Akuntabilitas menjadi salah satu kunci untuk menilai seberapa efektif dan efisien penyelenggaraan daerah. Akuntabilitas di Wilayah Jawa Barat semakin membaik dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari paradigma kinerja pemerintah yang telah mengalami perubahan, tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian anggaran juga dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas. Syafruddin selaku Menteri PAN RB mengajak para kepala daerah untuk bekerja dan melaksanakan program secara efektif dan efisien, serta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh daerah dan masyarakat. Syafruddin juga memberikan rekomendasi agar setiap pemerintah daerah di Jawa Barat mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang

telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019)



Sumber: Data diolah penulis

**Gambar 1.2 Tingkat Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2018**

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Publik di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat sebesar 57% yang bermasalah. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap pelayanan publik, dan pengelolaan penggunaan anggaran yang dinilai belum efisien dan efektif (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Publik dalam pemerintahan dapat mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah.

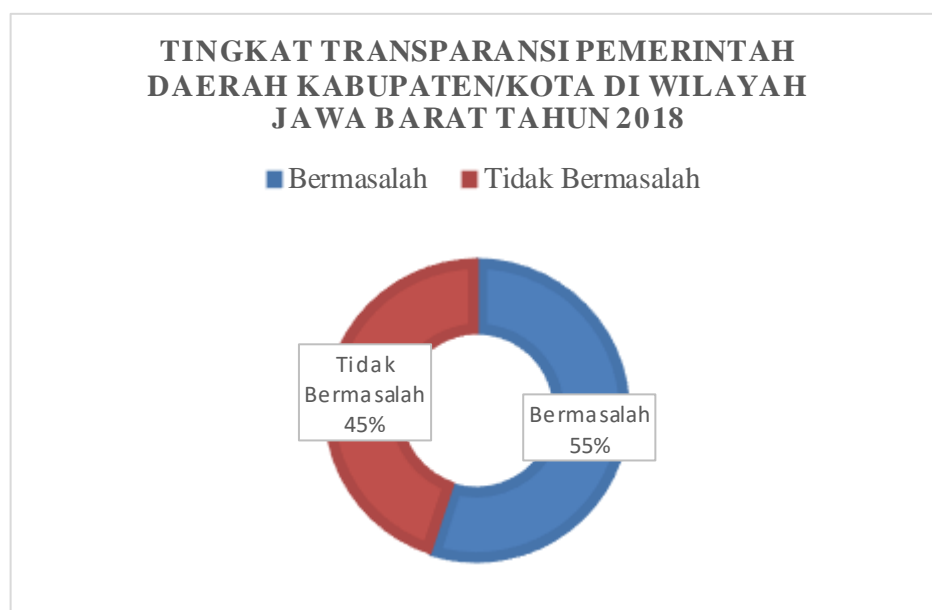
Selain akuntabilitas Publik, transparansi juga memiliki peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, karena transparansi memungkinkan masyarakat memahami kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik agar masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat serta mengevaluasi penilaian penyelenggaraan pemerintah. Transparansi memberikan gambaran untuk menilai apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana pelaksanaannya, dan bentuk umum pengelolaan keuangan kepada warga serta pemangku kepentingan. Kewajiban pelaporan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, kondisi ini menuntut pemerintah menyediakan segala informasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih prestasi dalam hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa prestasi tersebut akan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Terlebih di era digital, transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap sebuah informasi harus menjadi atensi. Sementara itu, ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi badan publik terbuka, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat, yaitu kualitas konten informasi, konsistensi dalam menghadirkan inovasi, dan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara interaksi dan akses masyarakat terhadap informasi (Febrinastri, 2019).

Berdasarkan data di bawah ini menunjukkan bahwa transparansi di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat tahun 2018 masih banyak yang bermasalah. Di Jawa Barat sendiri pengungkapan informasi masih bersifat

sukarela, hal ini menyebabkan tingkat keterbukaan informasi di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat dinilai belum cukup baik. Dampaknya masyarakat (publik) bisa saja menjadi tidak percaya akan kinerja pemerintah daerah (Fabiola, 2019). Dapat disimpulkan dari fenomena ini bahwa tingkat pengungkapan informasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 1.3

Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2018

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lucy Auditya, Husaini dan Lismawati (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu)”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pemilihan tahun pengamatan penelitian, sumber data, dan unit observasi. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2019. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber data yang digunakan, dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan data primer. Kemudian perbedaan selanjutnya pada populasi penelitian dimana populasi dari penelitian yang penulis lakukan yaitu pada 27 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan teori dan uraian di atas serta didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai: **“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Hampir 57% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat mengalami permasalahan terkait akuntabilitas publik yang disebabkan oleh

kurangnya pelayanan publik, dan pengelolaan penggunaan anggaran yang dinilai belum efisien dan efektif.

2. Terdapat kelemahan dalam Transparansi yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat. Hampir 55% kelemahan tersebut diakibatkan oleh pengungkapan informasi yang masih bersifat sukarela.
3. Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat banyak yang mengalami masalah yakni sebesar 60%. Penyebab permasalahan tersebut yakni belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat layanan dasar maupun di tingkat layanan rujukan baik infrastruktur maupun tenaga kesehatan, sarana prasarana laboratorium pengujian pangan kurang memadai; serta daya saing kinerja antar provinsi yang lemah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
2. Bagaimana Transparansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
3. Bagaimana Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.

4. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
5. Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. Adapun tujuan penelitian secara rinci dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Transparansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan penelitian ini dengan harapan dapat digunakan untuk menunjang pengetahuan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan mengenai Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta menerapkan pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktiknya.

2. Bagi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi instansi di masa yang akan datang, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memaksimalkan potensi daerahnya.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang berguna sebagai referensi serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat tahun 2015-2019. Untuk mendapatkan data mengenai Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah penulis menggunakan data sekunder, penulis menggunakan data LAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), *website* resmi pemerintah daerah masing-masing, dan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dari hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum. Adapun kajian pustaka yang di kemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah dasar dari semua proses pemerintahan, dan keefektifan proses tersebut bergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menafsirkan bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka di bawah konstitusi dan hukum. Akuntabilitas adalah kondisi dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas.

Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang membutuhkan pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini merupakan bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa: “Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Menurut Bastian (2010: 385) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2013: 18) adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) Hak untuk tahu (*right to know*), 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) Hak untuk didengas aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada masyarakat luas.”

Pengertian akuntabilitas publik Lukito (2014) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.”

Pengertian menurut Mahmudi (2016: 19) dalam pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*principal*).”

Sistem akuntabilitas sektor publik memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, karena implementasi sistem akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan akuntabilitas kepada publik karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan pandangan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyatakan dan melaporkan segala kegiatan dari individu atau organisasi, terutama di bidang manajemen keuangan yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan memiliki arti bahwa akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik. Ide ini berasal dari gagasan bahwa administrasi publik adalah masalah pemerintahan yang bersih atau pemerintahan yang bersih. Berdasarkan perspektif pengendalian, akuntabilitas merupakan tindakan untuk mencapai tujuan.

(PP No 71 Tahun 2010: Bastian, 2010: Mardiasmo, 2013: Lukito, 2014: Mahmudi, 2016)

2.1.1.2 Prinsip Akuntabilitas Publik

Menurut Budiardjo (2007: 81) prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. “Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.”

2.1.1.3 Manfaat Akuntabilitas Publik

Menurut Asis (2006) menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau mencegah praktek korupsi salah satunya adalah meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi di kalangan elit politik.

Menurut Albugis (2016), manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk :

1. “Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsivitas organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

2.1.1.4 Dimensi Akuntabilitas Publik

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik menuntut agar lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih memperhatikan pada pertanggungjawaban horizontal (kepada publik) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (akuntabilitas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja

(dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR).

Menurut Mahmudi (2013) terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.”

2.1.1.5 Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Reformasi yang sedang berlangsung mendorong pemerintah untuk merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah yang diprakasai oleh Menteri Dalam Negeri bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berupaya mengembangkan indikator yang dapat membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi fiskal.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melanjutkan usaha di atas dengan memulai mengembangkan sistem pemeringkatan pemerintah daerah untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Indikator yang

digunakan untuk mengevaluasi otoritas tambahan yang mungkin ditransfer kepada pemerintah daerah dan jenis bantuan teknis apa saja yang diperlukan. Indikator tersebut mencakup empat fungsi yaitu perencanaan dan pemograman, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, desain, dan implementasi proyek.

Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999, usaha tersebut di atas berlanjut yang mengharuskan eselon II ke atas untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kemudian dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Eselon II dan yang lebih pelaporan atas kinerja instansi pemerintahnya. Namun demikian, masih banyak kendala terutama pada teknis pelaksanaannya.

2.1.1.6 Instansi Pemerintah Yang Akuntabel

Berdasarkan PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2010, ruang lingkup evaluasi kinerja akuntabilitas pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi :

1. “Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi; dan
2. Penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah.”

Menurut PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang meliputi :

1. “Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;

3. Evaluasi kinerja
4. Pelaporan kinerja; dan
5. Capaian kinerja.”

Komponen, sub-komponen dan bobot untuk masing-masing komponen secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Komponen, Sub-Komponen dan Bobot Penilaian

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	35%	a. Rencana startegis 12,5%, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra; b. Rencana Kinerja Tahunan 22,5%, meliputi: Pemenuhan RKT (4,5%), Kualitas RKT (11,25%), dan Implementasi RKT (6,75%)
2.	Pengukuran Kinerja	20%	a. Pemenuhan Pengukuran 4% b. Kualitas Pengukuran 10% c. Implementasi Pengukuran 6%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi 2% b. kualitas evaluasi 5% c. pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5.	Capaian Kinerja	20%	a. kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. kinerja lainnya 5%
Total		100%	

Sumber : PermenPAN dan reformasi birokrasi No. 25 Tahun 2012

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang akuntabel pada akhirnya akan ditentukan di dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Kategori Nilai Akhir Penilaian

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Memuaskan

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
2.	A	>75-85	Sangat Baik
3.	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	0-30	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber: PermenPAN dan reformasi birokrasi No. 13 Tahun 2010

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Salah satu karakteristik dari *Good Governance* adalah transparansi. Transparansi didasarkan pada akses kebebasan memperoleh informasi yang berlaku untuk kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam perturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi ialah

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Menurut Agoes dan Ardana (2009) pengertian transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hak yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Menurut Mardiasmo (2009) pengertian transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.”

Pada institusi atau lembaga publik, transparansi keuangan menjadi salah satu hal yang terpenting, karena keuangan merupakan sektor paling beresiko yang mungkin akan disalahgunakan. Transparansi keuangan bertujuan untuk menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak yang berkepentingan.

Menurut Anggraini (2013: 205) bahwa pengertian transparansi ialah :

“Transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Sehingga masyarakat secara mudah bertanya mengenai hasil kegiatan ataupun pengelolaan keuangan.”

Kemudian menurut Mursyidi (2015: 44), transparansi adalah sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya para peraturan perundang-undangan.”

Transparansi artinya adanya kebijakan pengawasan yang terbuka. Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi tentang segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat melahirkan persaingan politik yang adil dan toleran, serta kebijakan yang disusun sesuai dengan preferensi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hal dasar terhadap pemda, yaitu :

1. “Hak untuk mengetahui, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan yang dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasi, yaitu yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya.”

Transparansi tidak terbatas pada ketersediaan informasi tersebut, tetapi informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat (publik), namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang keluar dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai Transparansi dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, yang dilandasi oleh hak masyarakat untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. (PP No. 71 Tahun 2010: Agoes dan Ardana, 2009: Mardiasmo, 2009: Anggraini, 2006: Mursyidi, 2015: Mardiasmo, 2002)

2.1.2.2 Indikator Transparansi

Prinsip yang memastikan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Krina (2003) menyatakan bahwa prinsip ini menekankan kepada 2 aspek:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. “Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.”

2.1.2.3 Manfaat Transparansi

Transparansi berarti akses terbuka ke semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan dan kebijakan pemerintah dan lainnya yang bisa diakses oleh publik, sehingga arus informasi yang bebas cukup untuk pemahaman dan pemantauan. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan melalui keterbukaan

informasi, masyarakat dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/ suara pengambilan keputusan, walaupun hanya sebagian saja. Transparansi juga dapat menunjukkan semua proses dan hasil kegiatan pemerintah, sehingga membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dan kecurangan lainnya di lingkungan pemerintahan.

Manfaat transparansi menurut Andrianto (2007), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu:

1. “Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.”

2.1.2.4 Dimensi Transparansi

Transparansi artinya keterbukaan saat memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut:

1. “*Invormativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders*, yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2009) antara lain adalah:
 - a. Tepat waktu.
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai.

- Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c. Jelas.
Informasi harus jelas sehingga dipahami tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat.
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
 - e. Dapat dibandingkan.
Laporan keuangan hendaknya dapat dibandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Atas hal tersebut, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses.
Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. *Openness* (keterbukaan), yaitu keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
 3. *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja finansial.
 - a. Kondisi keuangan.
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan pengurus.
Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

2.1.2.5 Transparansi Berbasis Website

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaksanaan tugas pemerintah dalam hal ini penyampaian informasi publik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Melalui *website* resmi pemerintah daerah menjadikan media lebih

efisien dan mudah digunakan. Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan pemerintahan yang berbasis internet atau penerapan *e-government*. Salah satu tujuan pengembangan *e-government* adalah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan publik dengan mudah. Regulasi ini, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan pemda untuk membentuk *website* resmi seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri, pengungkapan informasi pada *website* resmi pemerintah daerah masih bersifat *voluntary* (sukarela). Akibatnya, tingkat keterbukaan informasi di masing-masing *website* pemerintah daerah masih berbeda. Motivasi untuk melaporkan informasi pemerintah secara sukarela di situs web tergantung pada urgensi masing-masing pemerintah daerah.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik telah menimbulkan gejolak yang bersumber dari ketidakpuasan. Tuntutan yang lebih tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang di amanatkan kepada mereka. Atas hal tersebut, kinerja instansi pemerintah kini semakin

mendapatkan sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka terima dari pelayanan instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengemukakan bahwa kinerja adalah :

“Keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Mahsun (2018) kinerja (*performance*) adalah sebagai berikut :

“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan tersebut berupa tujuan atau indikator tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.”

Menurut Mangkunegara (2010) kinerja adalah :

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”

Menurut Sutrisno (2009) pengertian kinerja merupakan :

“Hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.”

Sedarmayanti (2009) mengungkapkan bahwa kinerja ialah :

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi berhubungan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan etika.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah merupakan gambaran hasil kerja seseorang atau organisasi atas tingkat pencapaian yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan visi dan misi instansi pemerintah. (Perpes No. 29 Tahun 2014: Mahsun, 2018: Mangkunegara, 2010: Sutrisno, 2009: Sedarmayanti, 2009)

2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Tujuan pengukuran kinerja menurut Rai (2011) adalah sebagai berikut :

1. “Menciptakan akuntabilitas publik.
2. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
4. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.”

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan sistem pengukuran kinerja sektor publik sebagai berikut :

“Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur material dan nonmaterial.”

Menurut Mahsun, dalam bukunya Pengukuran Kinerja Sektor Publik (2018) menjelaskan bahwa :

“Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja komprehensif dirancang untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang (*sustainable*). Sebelum proses pengukuran kinerja dilakukan, berbagai aktivitas

manajemen strategi harus sudah didesain dan dilaksanakan, yaitu perencanaan strategis, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan implementasi. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan.”

Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah bukanlah suatu kegiatan yang baru. Setiap departemen, unit kerja, dan unit pelaksana tugas yang telah di program untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun sayangnya, pelaporan tersebut lebih memfokuskan pada *input* (masukan) seperti jumlah tenaga, dana dan lain-lain.

Terkadang ada juga instansi yang melaporkan *output* (keluaran) dari program yang dilaksanakan, misalnya jumlah kilometer jalan maupun unit jembatan yang dibangun, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan, dan lain-lain. Informasi atas *input* dan *output* dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, tetapi melalui pengukuran kinerja fokus pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya tersebut. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

2.1.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sektor publik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sedangkan dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :

1. “Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.”

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Novitasari (2011: 67) berpendapat ada dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu :

1. “Variabel Individual, meliputi: disiplin, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta faktor individual lainnya.
2. Variabel Situasional :

- a. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan ventilasi).
- b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, pelatihan, pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.”

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama karyawan dapat mengatasi faktor-faktor tersebut dengan baik untuk meningkatkan kinerja, maka faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja.

Mangkunegara (2013:67) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

1. “Faktor Kemampuan
Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
2. Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.”

2.1.3.5 Dimensi dan Indikator Kinerja

Menurut Mangkunegara (2013), yang meliputi dimensi dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. “Kualitas Kerja
Memajukan kerapihan, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja tanpa harus melakukan banyak pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan.
2. Kuantitas Kerja
Menampilkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.

3. **Tanggung Jawab**
Menunjukkan seberapa banyak pegawai dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, serta bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya sehari-hari, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerja sehari-hari.
4. **Kerjasama**
Karyawan bersedia berpartisipasi secara vertikal dan horizontal dengan karyawan lain baik di dalam maupun di luar pekerjaan agar hasil kerjanya lebih baik.
5. **Inisiatif**
Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban seorang pegawai.

Menurut Bastian (2010) elemen yang terdapat dalam indikator kinerja adalah:

1. “Indikator Masukan (*input*)
Mengukur jumlah sumber daya seperti dana, sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Indikator Proses (*process*)
Organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.
3. Indikator Keluaran (*output*)
Digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Atas perbandingan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Indikator Hasil (*outcome*)
Lebih utama dari sekedar *output*. Atas indikator *outcome*, organisasi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator Manfaat (*benefit*)
Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan lokasi).”

Indikator-indikator tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjukkan derajat pencapaian target. Berkaitan dengan hal tersebut,

menentukan indikator kinerja kegiatan adalah proses penentuan, perumusan, pemilihan dan konsultasi atau indikator kinerja rencana kelembagaan.

Menurut Sudarmanto (2014) ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu :

- a. *Quality*
- b. *Quantity*
- c. *Timeliness*
- d. *Cost-Effectiveness*
- e. *Need for supervision*
- f. *Interpersonal impact*

Beberapa kriteria dasar atau dimensi untuk kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Quality*, terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan.
- b. *Quantity*, terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
- c. *Timeliness*, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.
- d. *Cost-Effectiveness*, terkait dengan penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.
- e. *Need for supervision*, terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan.
- f. *Interpersonal impact*, terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di antara sesama pekerja dan anak buah.”

2.1.3.6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sumber informasi utamanya adalah Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Selain itu menurut PP No. 6 Tahun 2008, dapat menggunakan sumber informasi pelengkap yang berupa :

- a. “Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Informasi keuangan daerah;
- c. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- d. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
- e. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah;
- f. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
- g. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
- h. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasal dari lembaga independen;
- i. Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD; dan
- j. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya”

Tabel 2. 3
Kategori Nilai Akhir Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Indeks EKPPD	Prestasi
$3,00 < \text{Skor} \leq 4,00$	Sangat Tinggi (ST)
$2,00 < \text{Skor} \leq 3,00$	Tinggi (T)
$1,00 < \text{Skor} \leq 2,00$	Sedang (S)
$0,00 < \text{Skor} \leq 1,00$	Rendah (R)

Sumber: Manual EKPPD Tahun 2016 Kemendagri (data diolah)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lucy Auditya, Husaini, Lismawati (2013)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu)	positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu
2.	Shinta Turalaki, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas (2013)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Pelayanan yang ada di dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelayanan yang ada di dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh positif dan tidak terlalu signifikan terhadap Kinerja Pelayanan yang ada di dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan
3.	Fladimir Edwin Mbon (2014)	Pengaruh Pasrtisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
4.	Vonny Nofisa Amril (2014)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kinerja Manajerial SKPD (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung)	Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung
5.	Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Secara simultan Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
6.	Wanda Fernandes (2015)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas mempengaruhi kinerja anggaran Transparansi mempengaruhi kinerja

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			anggaran. Pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran
7.	Irwan Taufiq Ritonga, Syamsul (2016)	Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Web	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat sedikit (rendah)
8.	Gede Ary Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini, Ida Bagus Putra Astika (2015)	Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif pada AKIP Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi pada AKIP
9.	Hari Eka Setiawan, Muhammad Safri (2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bungo)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo
10.	Eka Ratna Aprianti (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
11.	Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Sorong)	Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong
12.	Ridha Rahmadita Putri (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran
13.	Suryo Pratolo (2018)	<i>Effect Of Accountability and Transparency On Goverment Performance With Value For Money Method Through The Iinformation Technology Usage (Survey On Financial Management SKPD Bantul District)</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan pendekatan <i>Value For Money</i> Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan pendekatan <i>Value For Money</i> Penggunaan Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan pendekatan <i>Value For Money</i>
14.	Cindy Arifani (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Money</i> (Studi Kasus Pemerintah Pada Kota Jayapura)	<i>value for money</i> Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> . Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>
15.	Dito Aditia Darma Nasution (2018)	Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan
16.	Ait Vovantiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah
17.	Detasya Rigian, Ratna Purnama Sari (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel Kinerja Anggaran Pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Anggaran berbasis <i>Value For Money</i>
18.	Victorinus Laoli, SE., M.Si., Ak (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kabupaten Nias	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada Pemerintah Kabupaten Nias
19.	Nur Rodiya, Akhmad	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Riduwan (2020)	Publik, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya)	Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Transparansi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
20.	Bambang Jatmiko (2020)	Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)	Pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
21.	Ratna Mappanyukki (2020)	<i>The Effect Of Accountability and Transparency Of Regional Financial Management On Local Government Performance (Survey On DKI Jakarta Province)</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
22.	Gede Ary Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini, Ida Bagus Putra Asika (2015)	Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Kompetensi berpengaruh pada AKIP Komitmen organisasi mempengaruhi kompetensi pada AKIP

2.3 Kerangka Pemikiran

Teori utama pada penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *Stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih

fokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada keinginan pribadi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Di dalam *Stewardship Theory*, selaku *steward* dalam hal ini adalah pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan menjadi *principal* adalah rakyat selaku pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Menurut Haliah (2012), dalam penelitiannya bahwa organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan perusahaan *non-profit oriented* sangat sesuai dengan *stewardship theory*. Manajemen pemerintah lebih banyak bertindak sebagai *steward* karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan saksi yang digunakan serta frekuensi informasi yang diperlukan. (Slyke, 2007)

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Stewardship merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi. Bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi mereka lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. *Stewardship* lebih

mengarah pada informasi, transparansi, akuntabilitas dan aspek-aspek yang bersifat kolektivitas/kebersamaan.

Jatmiko (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari aspek-aspek berikut: (1) Terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan; (2) Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin; (3) Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. Atas diterapkannya akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2018) dan Nasution (2018), yang mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Putri (2017) dan Mbon (2014), dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Maka semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja aparat pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ait (2019) dan Detasya (2019), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil kinerja yang baik membutuhkan pertanggungjawaban secara

efisien, efektif dan ekonomis. Semakin tinggi akuntabilitas pada aparatur pemerintah maka akan semakin baik pula kinerja instansi pemerintah.

Mappanyukki (2020) serta Fernandes (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah (*steward*) yang berhasil meningkatkan kinerja organisasi pada umumnya memenuhi sebagian besar tujuan dan aspirasi masyarakat karena *steward* dapat melayani sebagian besar aspirasi dan tujuan masyarakat dengan baik.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka (2016) yang membuktikan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat penerapan akuntabilitas, maka kinerja instansi pemerintah daerah pun semakin baik.

Akuntabilitas harus mengacu pada berbagai standar kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Akuntabilitas menuntut agar pemerintah lebih menekankan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Konsep akuntabilitas yang luas ini membuat kita menyadari bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sistem komando kelembagaan, tetapi juga kepada publik, lembaga swadaya masyarakat,

media massa, dan banyak pemangku kepentingan. Karena semakin tinggi akuntabilitas maka semakin baik pula kinerja instansi pemerintah.

2.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pada konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi (transparansi), baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) sehingga teori *stewardship* dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik.

Fanny (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penyebab transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah karena transparansi melalui SKPD mengungkapkan informasi kepada publik melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Melalui transparansi juga tersedianya informasi yang memadai tentang penyusunan rencana kerja dan informasi laporan keuangan daerah yang diberikan tepat waktu serta handal.

Menurut Arifani (2018) dan Nur (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

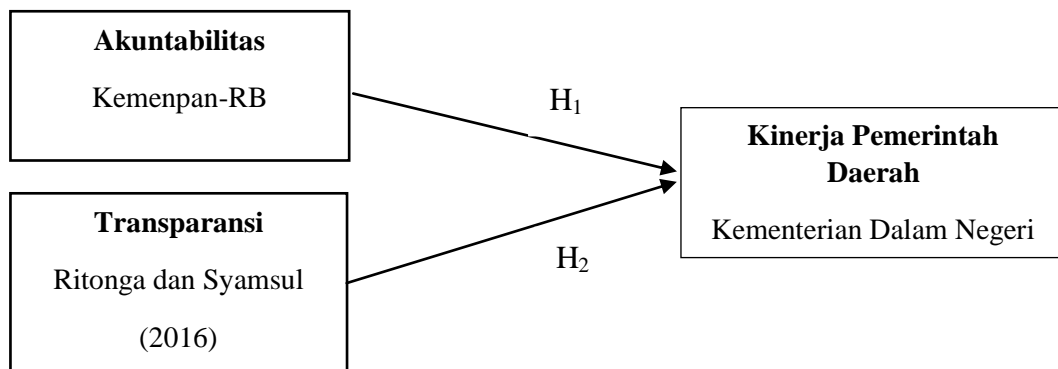
Hal tersebut dikarenakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memberikan informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja aparat pemerintah daerah.

Shinta (2013) dan Eka (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi menunjukkan arah yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika transparansi dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kinerja pemerintah daerah. Transparansi dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan penelitian Budi (2015) yang membuktikan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Buleleng yang merupakan bukti keseriusan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas korupsi. Disamping itu transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang ada untuk kepentingan masyarakat dan hal ini adalah bukti bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik atau dapat dikatakan berpengaruh positif.

Transparansi dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan dengan transparansi yang dilakukan pemerintah dengan mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui

media yang tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Karena semakin pemerintah transparan, maka masyarakat (publik) bisa menilai bahwa kinerja instansi pemerintah daerah berjalan dengan baik.



Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan belum baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Barat tahun 2015-2019.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Barat tahun 2015-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode yang peneliti menggunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) dalam bukunya mengemukakan tentang metode penelitian kuantitatif sebagai berikut :

“Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.”

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan alat penelitian yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Objek penelitian merupakan metode untuk mengidentifikasi dan pertukaran informasi ilmiah di dalam sumber penelitian yang tujuan utama ialah melakukan dan menyediakan mekanisme untuk mengaitkan sumber daya terkait tentang suatu penyelidikan ilmiah sehingga dapat dibagikan menggunakan suatu

pengenal. Menurut Sugiyono (2018) mengungkapkan bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.”

Lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai akuntabilitas publik, transparansi dan kinerja pemerintah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat tahun 2015-2019.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif adalah sebagai berikut :

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Sedangkan menurut Nazir (2013) metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu akuntabilitas publik, transparansi dan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Nazir (2011) adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau adanya hubungan antar variabel. Pada penelitian ini, pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji besarnya pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat tahun 2015-2019.

3.2 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Pada dasarnya definisi variabel penelitian menurut Sugiyono (2016) adalah sebagai berikut :

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Di dalam sebuah penelitian ada dua variabel yang digunakan, yang dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

3.2.1.1 Variabel Bebas (Independent Variable)

Menurut Sugiyono (2016) variabel bebas (*independent variable*) adalah :

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Penelitian yang dilakukan penulis ini variabel bebas atau variabel independennya adalah Akuntabilitas Publik (X_1) dan Transparansi (X_2).

1. Akuntabilitas Publik

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

2. Transparansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Transparansi adalah sebagai berikut:

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

3.2.1.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Untuk penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya dalam penelitian ini

adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Menurut Mahsun (2018) Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

3.2.2 Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015) adalah sebagai berikut :

“Suatu atribut atau sifat nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” maka terdapat empat variabel penelitian, operasional variabel dalam penelitian ini terdapat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X ₁)	“Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (SAKIP) (Kementerian Pendayagunaan	Rasio

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
	(PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	
Trasparansi (X ₂)	<p>“Transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perpan.”</p> <p>(PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah)</p>	<p>Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan di <i>website</i></p> <p>Jika tersedia diberi skor 1 Jika tidak tersedia diberi skor 0</p> <p>(Ritonga dan Syamsul, 2016)</p>	Nominal
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	<p>“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam <i>strategic planning</i> suatu organisasi.”</p> <p>(Mahsun, 2018)</p>	<p>Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>(Kementerian Dalam Negeri)</p>	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota dengan periode waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 3. 2
Populasi Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung	15	Kabupaten Subang
2	Kabupaten Bandung Barat	16	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Bekasi	17	Kabupaten Sumedang
4	Kabupaten Bogor	18	Kabupaten Tasikmalaya
5	Kabupaten Ciamis	19	Kota Bandung
6	Kabupaten Cianjur	20	Kota Banjar
7	Kabupaten Cirebon	21	Kota Bekasi
8	Kabupaten Garut	22	Kota Bogor
9	Kabupaten Indramayu	23	Kota Cimahi
10	Kabupaten Karawang	24	Kota Cirebon
11	Kabupaten Kuningan	25	Kota Depok
12	Kabupaten Majalengka	26	Kota Sukabumi
13	Kabupaten Pangandaran	27	Kota Tasikmalaya
14	Kabupaten Puwakarta		

3.3.2 Sampel Penelitian dan Teknik Sampling

Definisi Sampel menurut Sugiyono (2016) adalah :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.”

Teknik *sampling* menurut Sugiyono (2016) adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Teknik *sampling* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Teknik *sampling* yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2016). Adapun yang menjadi sampel adalah seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016).

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data. Data terkait informasi akuntabilitas pemda diperoleh dari LAKIP tahun 2015-2019 yang dipublikasikan oleh Kemenpan-RB. Data mengenai tingkat pengungkapan pada *website* diperoleh dari hasil observasi penulis terhadap masing-masing *website* resmi pemda. Data terkait informasi kinerja instansi pemerintah diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dipublikasikan oleh Kemendagri. Data kemudian diolah oleh peneliti dengan bantuan *Microsoft Excell*.

3.5 Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Analisis Data Deskriptif

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Sugiyono (2016) mengungkapkan bahwa analisis data deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Analisis dalam penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis deskriptif antara menggunakan nilai maksimum, nilai minimum dan nilai rata-rata (*mean*). Sedangkan untuk menentukan kategori penilaian setiap nilai rata-rata (*mean*) perubahan pada variabel penelitian, maka dibuat tabel distribusi.

1. Akuntabilitas Publik

Untuk melihat penilaian atas akuntabilitas dapat dilihat dari tabel penilaian di bawah ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh data nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Membuat tabel pengelompokan indeks SAKIP dan Status Prestasi
- c. Menentukan Kriteria Penilaian

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Akuntabilitas Publik

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	>85-100	Memuaskan
2.	A	>75-85	Sangat Baik
3.	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	0-30	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber: PermenPAN dan reformasi birokrasi No. 25 Tahun 2012

2. Transparansi

Untuk melihat penilaian atas transparansi dapat dilihat dari tabel penilaian di bawah ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh data ketersediaan informasi keuangan dan-non keuangan
- b. Mengelompokkan dengan memberi skor 1 untuk ketersediaan informasi dan 0 untuk tidak ketersediaan informasi
- c. Menentukan Kriteria Penilaian dengan skor yang dominan muncul

Keterangan : 1 = Transparansi

0 = Tidak Transparansi

Sumber: Ritonga dan Syamsul (2016)

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk melihat penilaian atas kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel penilaian di bawah ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh data nilai/skor kinerja pemerintah daerah melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Menentukan Kriteria Penilaian

Tabel 3.4

Kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Indeks EKPPD	Prestasi
$3,00 < \text{Skor} \leq 4,00$	Sangat Tinggi (ST)
$2,00 < \text{Skor} \leq 3,00$	Tinggi (T)
Indeks EKPPD	Prestasi

$1,00 < \text{Skor} \leq 2,00$	Sedang (S)
$0,00 < \text{Skor} \leq 1,00$	Rendah (R)

Sumber: Manual EKPPD Tahun 2016 Kemendagri (data diolah)

3.5.2 Analisis data Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang berarti menguji kebenaran teori yang sudah ada. Pada penelitian ini, analisis verifikatif bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode analisis verifikatif ini dilakukan dengan langkah berikut.

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan pada penelitian sudah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Uji asumsi yang dilakukan adalah :

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan

analisis grafik dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Menurut Santoso (2012:293), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*asymptotic significance*), yaitu :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode grafik normal probability plots dalam program SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa modal regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan *problem multikolinearitas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model

regresi diulang kembali (Santoso, 2012). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka tolerance di atas 0,1. Batas *variance inflation factor* adalah 10. Jika nilai *variance inflation factor* di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati, 2012). Menurut Santoso (2012) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}}$$

$$\text{Tolerance} = \frac{1}{VIF}$$

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Dampak yang akan terjadi apabila terdapat keadaan heterokedastisitas adalah sulit mengukur standar deviasi yang sebenarnya, dapat menghasilkan standar deviasi yang sebenarnya, dapat menghasilkan standar deviasi yang terlalu lebar maupun terlalu sempit. Jika tingkat *error* dari varians terus bertambah, maka tingkat kepercayaan akan semakin sempit.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y - \text{prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Pada penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* yaitu dengan membandingkan *Durbin Watson* hitung (d) dengan nilai *Durbin Watson* table, yaitu batas atas

(d_u) dan batas bawah (d_L). Uji *Durbin-Watson* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DW = \frac{\sum(e - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Keterangan :

DW : Nilai Durbin-Watson test

E : Nilai residual

e_{t-1} : Nilai residual satu periode sebelumnya

Adapun kriteria pengambilan keputusan atas uji autokorelasi menurut Santoso (2012) adalah sebagai berikut :

- Bila $d_u < DW < 4-d_u$ berate mengindikasikan tidak ada masalah autokorelasi.
- Bila $d_u \leq DW \leq d_u$ atau $4-d_u \geq 4-d_L$, maka ada kesimpulan yang dapat diambil.
- Bila $DW \leq d_L$, maka diindikasikan terjadi autokorelasi positif.
- Bila $DW > 4-d_L$, maka diindikasikan terjadi autokorelasi negatif.

3.5.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda (*mukltiple regression*). Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Jadi, analisis regresi linear berganda dapat dilakukan apabila jumlah variabel indepdennya minimal 2 (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen (Akuntabilitas Publik dan Transparansi) dan 1 variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Menurut Sugiyono (2018), analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kinerja Pemerintah Daerah
 a : Konstanta, nilai Y bila X = 0 (harga konstan)
 b₁, b₂, b₃ : Koefisien Regresi untuk X₁, X₂, X₃
 X₁ : Akuntabilitas Publik
 X₂ : Transparansi
 ε : Standar *error*

3.5.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Apabila dua atau lebih variabel terlibat dalam analisis korelasi, korelasi antara variabel dependen hanya dengan satu variabel independen khusus disebut korelasi parsial. Sugiyono (2018: 239) menyatakan bahwa :

“Korelasi parsial digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih, bila terdapat variabel yang dikendalikan.”

Jenis korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linear) adalah korelasi *Pearson Product Moment* (r) dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(n \sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah data

$\sum X$: Total variabel X

$\sum Y$: Total variabel Y

Kolerasi PPM (Pearson Product Moment) dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga ($-1 \leq r \leq +1$). Apabila nilai $r = -1$ artinya kolerasi negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada kolerasi; dan $r = 1$ berarti kolerasi sangat kuat.

Tabel 3.5
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2018: 278)

3.5.3 Koefisien Determinasi

Analisis determinasi merupakan analisi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Menurut

Sugiyono (2015), koefisien determinasi diperoleh dari koefisien korelasi pangkat dua, sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd : Koefisien determinasi

R^2 : Koefisien koerlasi yang dikuadratkan

3.5.4 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 105) hipotesis adalah :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif antara variabel independen yaitu Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Di dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak maka yang lain pasti diterima. Sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas bahwa jika (H_0) ditolak, maka (H_a) diterima.

3.5.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan signifikan pengaruh secara parsial dari variabel independen yaitu akuntabilitas publik dan transparansi

terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah. Menurut Sugiyono (2018: 278) rumus untuk menguji uji t adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

r : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

r^2 : Kuadrat koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n : Jumlah sampel

Uji t menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji t :

1. Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}
 - a. Jika $|t_{hitung}| \leq$, maka H_0 diterima dan H_α ditolak.
 - b. Jika $|t_{hitung}| >$, maka H_0 ditolak dan H_α diterima.
2. Perbandingan nilai signifikansi dengan taraf nyata
 - a. Jika nilai signifikansi \geq taraf nyata (0,05), maka H_0 diterima dan H_α ditolak.
 - b. Jika nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka H_0 ditolak dan H_α diterima.

Adapun rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0: \leq 0$: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_\alpha: > 0$: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_02 : \leq 0$: Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_02 : > 0$: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kriteria untuk penerimaan dan penolakan hipotesis nol (H_0) yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

H_0 diterima apabila : $\pm t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila : $\pm t_{hitung} > t_{tabel}$

Apabila H_0 diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Earning Power* Terhadap Manajemen Laba secara simultan dan parsial.

Menurut Sugiyono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota data

Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = k (n-k-1) dengan kriteria sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

Jika terjadi penerimaan , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Adapun yang menjadi hipotesis nol H_0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: tidak berpengaruh signifikan

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan

1. Penetapan tingkat signifikansi

Pegujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=0$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-variabel yang diteliti.

2. Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

Uji t:

H_0 diterima jika nilai – $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika nilai – $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

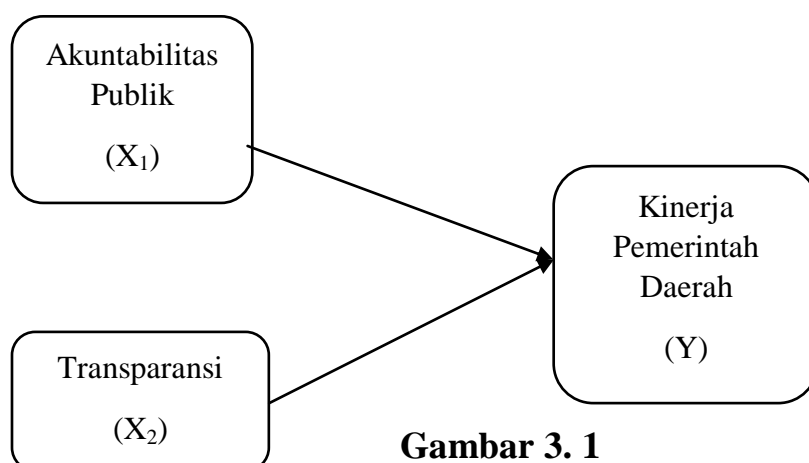
Uji F:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ jika

3.6 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi fenomena yang di teliti. Sesuai dengan judul skripsi, yaitu pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Berikut model penelitiannya :



Gambar 3. 1
Model Penelitian